

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Pluralisme di Indonesia: Kekuatan atau Tantangan ? Pengantar diskusi oleh:

1. **Radhar Panca Dahana** (Budayawan)
2. **Yosmardin** (Kasubdit Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri)

Moderator : Adinda Tenriangke Muchtar , Direktur Program The Indonesian Institute

Partisipan

Peserta yang hadir +/- 18 orang. Peserta dari berbagai kalangan. Dari kalangan *civil society* antara lain dari HKBP Jakarta, Formappi dan lain sebagainya. Dari pemerintah ada Kementerian Dalam Negeri, dari DPD juga ada staf ahli dari GKR Hemas.

PEMBAHASAN

Moderator membuka diskusi dengan mengemukakan bahwa diskusi kali ini adalah seri yang ke-20 dan tema yang diangkat adalah Pluralisme. Di awal moderator menyatakan bahwa isu pluralisme yang terakhir misalnya soal Sampang, itu bukanlah isu yang baru. Beberapa tahun belakangan ini, isu-isu ini terus berkembang, bukan hanya dalam kehidupan kemasyarakatan secara umum namun juga situasional misalnya pada saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

- (1) **Yosmardin**, dengan makalah dengan judul *Bhinneka Tunggal Ika, Pluralisme Indonesia*. *Bhinneka Tunggal Ika* sudah ada sejak sebelum kita merdeka. Bukan hanya *Bhinneka* namun juga *tunggal ika*. Kita tidak meletakkan keberagaman dalam satu entitas saja, tapi kita ikat dalam kesatuan. Maka keberagaman atau ke *bhinneka-an* itu harus diletakkan dengan ke-*tunggal ikaan*. Ini jugalah *positioning* dari Kementerian Dalam Negeri.

Di awal kemerdekaan, konsep *kebhinnekaan* ini menjadi pemersatu sehingga memperkuat kebanggaan. Pada era orde baru, ada reduksi dari pemaknaan *kebhinnekaan*, bagaimana ada reduksi dari semua konsep *kebhinnekaan* kita. *Kebhinnekaan* seperti dipaksakan hadir namun tidak menyelesaikan masalah kita.

Kemudian di era reformasi itu kembali muncul dan dia bergerak bersama dengan maraknya isu *civil society*, gender, dan sebagainya. Dalam tahap sekarang, *pluralism* itu menjadi sesuatu yang cair. Pemerintah tidak bisa semena-mena menetapkan satu arti *kebhinnekaan* itu namun haruslah mengakomodir suara atau pendapat masyarakat.

Bagi Kementerian dalam negeri, ada usaha untuk merevitalisasi dari nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya juga sangat terlihat konsep dari *kebhinnekaan* itu dalam konsep kekinian sehingga peran dari semua pihak itu sangat diperlukan dan menjawab permasalahan kekinian saat ini. Alasan untuk kembali merevitalisasi dari konsep pluralisme ini adalah bahwa di masyarakat kita saat ini ada friksi-friksi dari berbagai pihak yang misalnya kaum agama, beranggapan bahwa yang berbau *pluralism* itu adalah sesuatu yang asing yang bertentangan dengan keyakinannya sehingga seringkali mereka lawan.

Pertanyaanya kemudian, dalam kondisi kekinian, mungkin *kebhinnekaan* ini akan melemahkan kebanggaan kita? Kemendagri melihatnya itu tidak bisa dilihat seperti itu tapi harusnya bagaimana *kebhinnekaan* itu ada harmonisasinya dan ada satu pengikat yaitu bahwa kita adalah dalam satu kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia. Dan *Kebhinnekaan* ini memang menjadi tantangan di saat arus informasi dan globalisasi berlangsung sangat cepat, dan akan sangat mudah.

- (2) **Lolly Suhenti** (tenaga ahli GKR Hemas). Di awal, mbak Lolly menyampaikan permintaan maaf bahwa ibu GKR Hemas tak bisa datang. Dan mbak Lolly juga menyampaikan beberapa posisi dari DPD, yaitu bahwa DPD mengecam keras aksi yang merusak *pluralism* ini misalnya kasus Sampang. Dan terkait Sampang ini, DPD juga menuntut agar kasus tersebut diusut sampai tuntas. DPD juga melihat bahwa

kasus Sampang ini bukan hanya soal perpecahan Syiah dan Sunni namun bahwa ada usaha-usaha untuk mempolitisasi kasus ini.

Dari berbagai konflik yang terjadi, DPD melihat itu tetap langgeng berjalan karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah untuk memutus mata rantai konflik ini. DPD melakukan berbagai konfirmasi, namun ada masalah dari hal keterbatasan kewenangan dari DPD itu sendiri. DPD bisa memanggil gubernur Jawa Timur, namun semua hasilnya itu kemudian diberikan lagi DPR dan kemudian berkoordinasi dengan pemerintah dan kemudian baru eksekusi.

Dalam penanganan konflik, sikap pemerintah terkesan abu-abu. Tidak terlalu keras karena takut dianggap akan melanggar HAM, namun juga akhirnya tidak melakukan apa-apa sehingga hal ini yang kemudian bisa “menjamurkan” konflik-konflik di masyarakat dan inilah yang kemudian menyebabkan intoleransi.

(3) Radhar Panca Dahana ada paradoks yang selalu dimunculkan dalam statement pemerintah terhadap pluralism. Dalam satu sisi ingin membangkitkan nilai-nilai pluralism dan di saat yang sama juga ingin ada kesatuan, tetapi tidak ada penjelasannya.

Pada saat ini para pejabat kita itu mengalami paradoks-paradoks ini Terjadi transplantasi kebudayaan ke Indonesia adalah melalui proses kolonisasi dan globalisasi, dan gagal beradaptasi dalam kekinian sehingga tidak punya bentuk asli dan tidak muncul. Dan ini terjadi karena kita tidak mengenal diri kita sendiri.

Salah satu pendekatan yang bisa kita ambil adalah lewat kebudayaan. Hal ini adalah karena kebudayaan itu holistic dan kebudayaan kita adalah yang paling bagus dibanding India, China dan Yunani. Oleh karena itu penting sekali untuk kita mengetahui diri kita sendiri. Dan mampu menjelaskan diri sendiri dengan logisnya kedaerahan itu sendiri. Dan ini akan menjadi kekuatan kita jika benar kita mengidentifikasinya.

Perlu sekali mengidentifikasi karakter kita, dan itu harusnya dari pemerintah khususnya dari Kemendagri, namun sampai saat ini belum ada. Dan seolah-olah kalau kita analogikan pada ilmu psikologi, maka Indonesia itu seperti schizophrenia, yaitu mengalami split kepribadian. Di satu sisi menampilkan kemodernan, namun di sisi lain tetap mempertahankan segala hal yang mistis dan menjadikannya dalam satu kearifan lokal. Namun jika dulu ada yang bisa menjadi jembatan ke masyarakatnya dengan memaksimalkan kedua hal itu sehingga masyarakat benar sangat menghargai mereka dan merasa memang mereka punya pemimpin. Dan yang terjadi sekarang, pemimpinnya itu tidak dikenal masyarakatnya dan malahan tampil hanya sebatas kelembagaan.

Terlihat bahwa pendekatan kebudayaan itu penting, namun pemerintah untuk kebudayaan ini hanya menggelontorkan 0,005 persen sangat berbanding terbalik dengan pendidikan yang sangat besar. Dan ini harusnya adalah menjadi perhatian oleh semua stakeholder.

FORUM DISKUSI

Romo Amo. Terkait Pancasila saat ini sangat sedikit sekali kita dengar. Dan pada era demokratisasi ini di saat orang lebih bebas untuk mengungkapkan pendapat, ekspresi dan sebagainya. Dan kemudian dengan konsep kebhinnekaan yang dulu kami pelajari di SD untuk kemudian saling menghargai semua perbedaan. Namun saat ini bagaimana ada kelompok yang ingin menang dan merasa benar sendiri. Di hal lain, ada perbedaan yang mencolok terhadap intoleransi dari “atas” kaum elit pemerintah itu, misalnya ada nya kebersamaan dan pluralism itu terlihat jelas dan damai. Tetapi di akar rumput itu berbeda, dimana cepet sekali terbakar dan merusak segala keharmonisan dalam perbedaan ini. Dan pertanyaannya apakah kemudian ini adalah hanya kepentingan dari sekelompok orang.

Didit, ASARI Grup. Ada hal yang tak dilihat adalah bahwa pemimpin kita tidak ada kemampuan untuk memutuskan apa yang kita mau dan apa yang kita tuju. Dan di masa lalu itu ada, namun saat ini sangat terlihat cemas. Dan terlihat bahwa sangat lemah leadershipnya.

Carla, HKBP Jakarta. Bagi saya NKRI bukan harga mati, tapi Indonesia ini belum selesai. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah mulai menggali diri kita sendiri dari budaya kita. Ada lokal wisdom, dan bagi banyak masyarakat kita itu malahan membuat mereka sejahtera dan tercukupi kebutuhan kita. Sehingga penting sekali untuk mengetahui diri kita sendiri, dan terutama juga adalah dari pemerintah itu juga. Pendekatan pembangunan itu juga harus diarahkan kesana dan bukannya infrastruktur yang sekarang menjadi focus terbesar investasi pembangunan kita.

Dan konflik selama ini tidak pernah tuntas terselesaikan. Hal ini juga mungkin adalah karena pemerintah kita yang ketika ada konflik pendekatan yang ada adalah pendekatan keamanan namun tidak pernah benar-benar datang kesana untuk mendengarkan di sana dan semua policy di daerah itu datangya dari Pusat dan tidak mengemukakan lokalitas itu sendiri.

Endang Srihadi. Keberagaman itu harus dijalankan dan bukan didoktrinkan dan itu harus sedari dini dan sehingga ketika beranjak dewasa ini sudah jadi kebiasaan. Dan pada saat ini, bagaimana kelompok masyarakat menengah juga berkontribusi dalam merosotnya ini misalnya dengan maraknya sekolah-sekolah berbasis agama yang eksklusif. Sehingga eksklusifitas itu kemudian menjadi tantangan-tantangan tersendiri di isu pluralism ini.

Tanggapan pengantar diskusi

Yosmardin, Kemendagri. Terkait politik dalam negeri, kenapa pemerintah menjadi tercerabut dari proses kebudayaan itu juga ada asalnya dari sistem pemilihan umum langsung yang kita anut. Ini adalah konsep yang seperti bom di daerah-daerah, memunculkan raja-raja kecil dan kita berpotensi sekali pada penciptaan berbagai konflik.

Konflik-konflik pilkada ini, pada akhirnya juga akan memicu penciptaan konflik-konflik lainnya di masyarakat. Hal yang juga perlu dilakukan adalah melakukan dialog-dialog langsung di daerah tersebut dari berbagai instansi pemerintah bersama rakyat. Dan memang ada kegalauan dalam pembuatan berbagai legislasi misalnya dari sisi legislasi hukum.

Radhar Panca Dahana. Setuju dengan perkataan bahwa Negara kita belum selesai dan tidak ada tanda-tanda selesai. namun sebenarnya tak apa, tapi kita ada pada tahap proses menjadi namun dalam proses menjadi itu perlu ada legislasi. Dan Indonesia itu para pendiri nya itu baru menciptakan atapnya, namun rumahnya belum ada. Dan inilah yang harus diisi dengan kebudayaan, dan sampai saat ini belum ada yang bisa menjelaskan apa itu kebudayaan Indonesia.

Negara Indonesia itu sebenarnya sudah selesai dalam hal perbedaan agama dan kebudayaan itu. Ada konflik-konflik terjadi dan bagaimana mengatasinya itu kita juga punya banyak kearifan lokal. Dan tapi pemerintah kita tak punya dan malahan memakai konsep dari luar. Maka pentingnya adalah belajar dari diri kita sendiri, dan bukan ke luar saja.

Catatan :

- 1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
- 2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".**

TERIMA KASIH